

**KAUSALITAS PENERIMAAN, BELANJA DAN PDRB**  
**PROVINSI JAMBI**

**Fitriana Afrianti**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci**  
e-mail : [fitrifia58@gmail.com](mailto:fitrifia58@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the causality between regional revenue and regional expenditure in Jambi Province, to determine the causality between regional revenue and GRDP in Jambi Province, and to determine the causality between regional spending and GRDP in Jambi Province. The result of the research that has been done is that there is a causality (two ways) between regional revenue and expenditure. This means that the higher regional expenditure, it can trigger an increase in regional revenue in Jambi Province, on the other hand, the higher the regional revenue, the higher regional spending in Jambi Province. Meanwhile, regional revenues and PDRB do not have a two-way causality relationship. This means that regional revenues have a relationship with GRDP, but on the other hand, PDRB has no relationship with regional revenues. Regional spending and GRDP do not have a two-way causal relationship. Regional spending has a relationship with GRDP, but on the other hand, GRDP has no relationship with regional spending.*

**Keyword:** Revenue, Regional Expenditure, GRDP

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kausalitas antara penerimaan daerah dengan belanja daerah di Provinsi Jambi, mengetahui kausalitas antara penerimaan daerah dengan PDRB di Provinsi Jambi, dan untuk mengetahui kausalitas antara belanja daerah dengan PDRB di Provinsi Jambi. Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu terdapat kausalitas (dua arah) antara penerimaan dan belanja daerah. Artinya semakin tinggi belanja daerah maka dapat memicu peningkatan penerimaan daerah di Provinsi Jambi, sebaliknya semakin tinggi penerimaan daerah maka akan meningkatkan belanja daerah di Provinsi Jambi. Sedangkan penerimaan daerah dan PDRB tidak memiliki hubungan kausalitas dua arah. Artinya penerimaan daerah memiliki hubungan dengan PDRB, tetapi sebaliknya PDRB tidak memiliki hubungan dengan penerimaan daerah. Belanja daerah dan PDRB tidak memiliki hubungan kausalitas dua arah. Belanja daerah memiliki hubungan dengan PDRB, tetapi sebaliknya PDRB tidak memiliki hubungan dengan belanja daerah.

**Keyword:** Penerimaan, Belanja Daerah, PDRB

## **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi secara sempit dapat di artikan dengan meningkatnya produksi total suatu daerah. Selain itu pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan pendapatan perkapita serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak akan pernah lepas dari peranan para pelaku ekonomi yakni pemerintah yang berperan sebagai instrumen kebijakan publik dan fiskal, swasta yang berperan dalam pengembangan investasi dan masyarakat itu sendiri yang berperan sebagai input dari faktor produksi dan jaminan terciptanya pasar dalam perekonomian.

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk melihat adanya gejala pertumbuhan ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). karena didalamnya mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan dicapai oleh penduduk selama periode tertentu. Produk domestik regional bruto (PDRB) juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah atau masyarakat.

Pembangunan di daerah pada dasarnya ditujukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah serta pemerataan pembangunan dan hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses pembangunan di daerah diharapkan mampu meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta mengoptimalkan pendayagunaan potensi daerah. Pembangunan daerah dipandang sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mampu mengelola sumber daya dan peluang-peluang yang ada yang membentuk pola kemitraan diantara keduanya untuk mengembangkan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Salah satu tolak ukur baik buruknya perekonomian suatu daerah dapat ditinjau dari aspek tingkat pertumbuhan ekonomi, karena indikator sasaran utama keberhasilan perkembangan perekonomian diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi.

Menurut Kuznets (2002:143) pertumbuhan ekonomi ditandai oleh 3 (tiga) ciri pokok, yakni laju pertumbuhan pendapatan perkapita yang nyata, distribusi angkatan kerja menurut sektor kegiatan produksi yang menjadi sumber nafkahnya serta pola persebaran penduduk. Pembangunan ekonomi daerah sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional memiliki peran yang sangat penting

dalam mewujudkan tercapainya tujuan nasional. Pembangunan ekonomi daerah di artikan sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di daerah tersebut.

Perekonomian merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Perekonomian menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan apabila seluruh balas jasa rill terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan rill masyarakat pada tahun sebelumnya. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur perekonomian suatu daerah pada periode tertentu adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator dalam mengukur perekonomian suatu propinsi. Dalam upaya memacu perekonomian Provinsi Jambi, maka diperlukan evaluasi lebih lanjut mengenai faktor-faktor utama yang mempengaruhi perekonomian dan seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut dalam menentukan perekonomian daerah. Hasil penelitian mengenai pengaruh faktor-faktor penentu PDRB tersebut akan dijadikan sebagai salah satu masukan bagi Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun Di Provinsi Jambi.

Menurut Todaro dan Smith (2006:204), Salah satu faktor yang mempengaruhi PDRB adalah adanya belanja daerah yang mampu meningkatkan produksi. Akumulasi modal atau biasa disebutkan dengan istilah investasi ini memainkan peranan penting dalam menggerakkan kehidupan ekonomi bangsa, karena pembentukan modal dapat memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan nasional, maupun menciptakan lapangan kerja baru yang nantinya akan semakin memperluas kesempatan kerja

Menurut Dumairy (2007:106), faktor tenaga kerja yang berkualitas juga mampu mendorong perekonomian. Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan

menyongsong era globalisasi ini. Semakin besar tenaga kerja produktif di suatu daerah maka output yang dihasilkan juga semakin besar. Tenaga kerja produktif ini terbentuk dari pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi namun demikian pertumbuhan penduduk yang tinggi juga delematis. Hal ini terjadi karena dengan tumbuhnya jumlah penduduk dalam skala besar namun disisi lain beban pemerintah semakin besar dan rawan terhadap timbulnya permasalahan pembangunan yang baru.

Pertumbuhan PDRB sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah, juga tidak bisa lepas dari peran pengeluaran pemerintah. Semakin besar pengeluaran pemerintah yang produktif maka semakin meningkat perekonomian suatu daerah. Pengeluaran pemerintah yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi output adalah sumber daya manusia, yang terefleksikan dengan penduduk yang bekerja. Jumlah penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi bila tidak diimbangi dengan peningkatan produksi, namun disisi lain, penduduk yang bertambah akan menambah jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan suatu daerah untuk menambah produksi. Jika penambahan jumlah penduduk tidak seimbang dengan faktor produksi lain yang juga terjadi penambahan tenaga kerja maka tidak akan menimbulkan penambahan dalam tingkat produksi. Tetapi tidak semua daerah yang dengan karakteristik tenaga kerja terserap yang cukup tinggi memiliki PDRB atau output daerah yang tinggi pula.

Untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat maka dapat digunakan dari sisi ekonomi melalui tingkat pendapatan. Untuk melihat tingkat pendapatan maka digunakan nilai dari Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) pendekatan pendapatan perkapita. PDRB perkapita dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk mengetahui sejauh mana nilai tambah yang dihasilkan dari berbagai kegiatan ekonomi dapat dinikmati oleh tiap penduduk.

Hubungan kausalitas antara penerimaan, belanja dan PDRB memiliki arti khusus bagi negara-negara berkembang dalam membuat kebijakan dan keputusan anggaran belanja. Penelitian terhadap pola atau arah hubungan kausalitas antara tingkat pengeluaran dan penerimaan pemerintah mendapatkan perhatian yang besar pada dekade sekarang ini. Pemahaman terhadap hubungan kausalitas tersebut, selain dapat mengidentifikasi hubungan antar variabel juga dapat memberikan sumbangan untuk memahami dengan lebih baik terhadap konsekuensi adanya defisit yang besar dan implikasi kebijakan yang diambil terhadap kebijakan tersebut. Kebijakan fiskal diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara untuk mengarahkan kondisi perekonomian yang lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan kepada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.

Menurut Loughy (2009:213), penerimaan dan pengeluaran pemerintah dapat saling mempengaruhi dengan cara sebagai berikut : *Pertama*, perubahan penerimaan pemerintah menyebabkan perubahan pengeluaran pemerintah artinya bahwa dengan meningkatnya penerimaan pemerintah menyebabkan pengeluaran yang besar. *Kedua*, perubahan pengeluaran pemerintah menyebabkan pengeluaran penerimaan yang besar sehingga mampu mengatasi defisit anggaran pemerintah. *Ketiga*, perubahan penerimaan dan pengeluaran pemerintah dapat saling mempengaruhi melalui pengaruh timbal balik (*feedback*), artinya bahwa tingkat pengeluaran yang tinggi disebabkan oleh tingkat penerimaan yang tinggi, demikian sebaliknya.

Tabel berikut ini menjelaskan tentang perkembangan Penerimaan Daerah, Belanja Daerah dan PDRB Provinsi Jambi tahun 2006 s.d 2015 yakni sebagai berikut :

**Tabel. 1**  
**Penerimaan Daerah, Belanja Daerah dan PDRB Provinsi Jambi**  
**tahun 2006 s.d 2015**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>Penerimaan Daerah (Juta Rupiah)</b>	<b>Belanja Daerah (Juta Rupiah)</b>	<b>PDRB-ADHB (Juta Rupiah)</b>
1	2006	1.010.116,94	963.238,88	26.061.774,00
2	2007	1.155.350,57	980.197,73	32.076.677,00
3	2008	1.436.796,23	1.404.982,48	41.056.484,00
4	2009	1.353.900,46	1.357.207,45	44.127.006,00
5	2010	1.640.186,00	1.448.130,00	90.618.411,30
6	2011	2.078.807,00	1.750.242,00	103.522.912,70
7	2012	2.662.700,00	2.259.160,00	115.070.400,10
8	2013	2.878.935,00	2.546.479,00	129.976.040,50
9	2014	3.165.056,00	3.181.997,00	144.807.643,50
10	2015	2.511.186,01	1.894.115,08	155.110.347,70
Jumlah		<b>19.893.034,21</b>	<b>17.785.749,62</b>	<b>882.427.696,80</b>
Rata-rata		<b>1.989.303,42</b>	<b>1.778.574,96</b>	<b>88.242.769,68</b>

Sumber : Laporan Realisasi APBD di Indonesia

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini ditempuh dengan cara Studi Kepustakaan (*library research*). Metode kepustakaan ini adalah metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan yang dengan

mempelajari teori-teori literatur, dan buku-buku yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Teori-teori ini digunakan sebagai bahan perbandingan data-data praktis serta landasan berpikir guna memperoleh suatu gambaran.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data time series. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif. Dilakukan analisis terhadap variabel penerimaan daerah, belanja daerah dan PDRB.

Adapun sumber data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini adalah berasal dari : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Indonesia.

### **Alat Analisis**

Estimasi model regresi dengan data panel dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan Granger Causality. Granger Causality yaitu pendekatan yang mempostulasikan bahwa suatu variabel X menyebabkan variabel lain Y, apabila Y saat ini dapat memprediksi lebih baik dengan menggunakan nilai-nilai masa lalu variabel X.

1. Mengikuti Holzt-Eakin, Newey dan Rosen, uji kausalitas Granger diformulasikan dengan bentuk umum model *vector autoregressive* (Haryo Kuncoro, 2007) sebagai berikut :

$$Y_{it} = a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k Y_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} b_l X_{it-l} + u_{lit} \dots\dots\dots (1)$$

$$X_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} \alpha_k X_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} \beta_l Y_{it-l} + u_{2it} \dots\dots\dots (2)$$

2. Persamaan yang kedua yaitu bentuk persamaan tidak berkendala/*unrestricted residual sum of squares (URSS)*, merupakan deferensiasi tingkat pertama untuk mengeliminasi efek individual yang selalu muncul dalam data panel. Model persamaanya dengan meregresi Y dengan semua lag Y dan X, dari hasil regresi diperoleh sebagai berikut :

$$\Delta Y_{it} = a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k \Delta Y_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} b_l \Delta X_{it-l} + \Delta u_{lit} \dots\dots\dots (3)$$

$$\Delta X_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} \alpha_k \Delta X_{it-k} + \sum_{l=1 \rightarrow n} \beta_l \Delta Y_{it-l} + \Delta u_{2it} \dots\dots\dots (4)$$

3. Pengujian koefisien  $b_1$  dan  $\beta_1$  akan dilakukan secara serempak dengan meregresikan Y pada semua lag Y dan variabel lainnya, tetapi tidak

mencakup variabel lag dari X, dari hasil regresi diperoleh persamaan berkendala/*restricted residual sum of squares (RRSS)*. Bentuk persamaannya sebagai berikut :

$$\Delta Y_{it} = a_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} a_k \Delta Y_{it-k} + \Delta u_{1it} \dots\dots\dots(5)$$

$$\Delta X_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1 \rightarrow m} \alpha_k \Delta X_{it-k} + \Delta u_{2it} \dots\dots\dots(6)$$

**Uji Hipotesis (Uji F)**

Tahap selanjutnya menggunakan uji hipotesis nol dengan statistik F, yang ditempuh dengan membandingkan nilai jumlah residual kuadrat yang diperoleh pada dua model estimasi yang berbeda, formula pengujian untuk kedua pasang persamaan di atas adalah sebagai berikut :

$$F = \frac{(RRSS - URSS) / m}{(URSS) / (N - k)} \dots\dots\dots (7)$$

(Manurung : 241, 2005)

Keterangan :

- F = uji hipotesis nol.
- RRSS = persamaan berkendala/*restricted residual sum of squares*.
- URSS = persamaan tidak berkendala/*unrestricted residual sum of squares*.
- m = jumlah lag pada variabel independen.
- N = jumlah data yang diobservasi.
- K = jumlah parameter yang ditaksir pada regresi yang direstriksi.

**HASIL PEMBAHASAN**

Alat perhitungan dalam analisis regresi ini menggunakan Eviews 6.0, dan dengan metode Uji Kausalitas Granger. Masing-masing variabel dalam pengujian regresi dapat mempunyai posisi sebagai variabel dependen dan variabel independen, karena sifat hubungan untuk metode kausalitas Granger adalah variabel X (posisi independen) dapat menyebabkan variabel lain (Y, posisi dependen), dan Y (independen) dapat diprediksi dengan menggunakan nilai X

(dependen) masa lalu. Dalam regresi ini membedakan perhitungan berdasarkan arah kausalitas variabel penerimaan terhadap belanja, arah kausalitas variabel belanja terhadap PDRB, dan arah kausalitas variabel penerimaan terhadap PDRB. Maka diperoleh nilai regresi yang dirangkum dalam Tabel 2.

**Tabel. 2**

**Simpulan Hasil Pengujian Arah Kausalitas Penerimaan Daerah, Belanja Daerah dan PDRB Provinsi Jambi tahun 2006-2015**

Pairwise Granger Causality Tests  
Date: 09/19/16 Time: 11:43  
Sample: 2006 2015  
Lags: 2

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
BELANJA does not Granger Cause PENERIMAAN	10	59,8573	0,0038
PENERIMAAN does not Granger Cause BELANJA		6,12521	0,0472
PDRB does not Granger Cause PENERIMAAN	10	2,11203	0,2125
PENERIMAAN does not Granger Cause PDRB		11,8565	0,0376
PDRB does not Granger Cause BELANJA	10	3,82545	0,1495
BELANJA does not Granger Cause PDRB		13,2763	0,0323

Sumber : Data Diolah

**Hasil Pengujian Hubungan Kausalitas Penerimaan, Belanja dan PDRB**

Nilai  $F_{tabel}$  diperoleh dengan menggunakan tabel distribusi  $F$   $F_{tabel} = F_{\{(1-\alpha)(dk=k)(dk=n-k-1)\}}$ ,  $F_{\{(2)(dk=k)(dk=10-2-1)\}}$  dimana :  $dk=2$  sebagai angka pembilang dan 7 sebagai angka penyebut, didapat nilai  $F_{tabel}$  adalah 4,737. Untuk melihat hubungan antar variabel maka  $F_{tabel}$  akan dibandingkan dengan  $F_{hitung}$  untuk masing-masing variabel.

### **Hubungan Kausalitas Penerimaan dan Belanja**

Pada variabel belanja daerah memiliki hubungan kausalitas dengan penerimaan daerah, hal ini dibuktikan dengan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $59,8573 > 4,737$ , kemudian nilai signifikansi atau probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 atau sebesar 0,0038. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi belanja daerah maka dapat memicu peningkatan penerimaan daerah di Provinsi Jambi.

Penerimaan daerah juga memiliki hubungan kausalitas dengan belanja daerah, hal ini dibuktikan dengan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $6,12521 > 4,737$ , kemudian nilai signifikansi atau probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 atau sebesar 0,0472. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi penerimaan daerah maka akan meningkatkan belanja daerah di Provinsi Jambi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan daerah dan belanja daerah memiliki hubungan timbal balik (kausalitas) dua arah.

### **Hubungan Kausalitas Penerimaan Daerah dan PDRB**

Variabel PDRB tidak memiliki hubungan kausalitas dengan penerimaan daerah, hal ini dibuktikan dengan nilai  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau  $2,11203 < 4,737$ , kemudian nilai signifikansi atau probabilitasnya lebih besar dari 0,05 atau sebesar 0,2125. Hal ini berarti bahwa peningkatan PDRB tidak akan mempengaruhi penerimaan daerah di Provinsi Jambi.

Sedangkan Penerimaan daerah memiliki hubungan kausalitas dengan PDRB, hal ini dibuktikan dengan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $11,8565 > 4,737$ , kemudian nilai signifikansi atau probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 atau sebesar 0,0376. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi penerimaan daerah maka akan meningkatkan PDRB di Provinsi Jambi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan daerah dan PDRB tidak memiliki hubungan kausalitas dua arah. Penerimaan daerah memiliki hubungan dengan PDRB, tetapi sebaliknya PDRB tidak memiliki hubungan dengan penerimaan daerah.

## **Hubungan Kausalitas Belanja Daerah dan PDRB**

Pada variabel PDRB tidak memiliki hubungan kausalitas dengan belanja daerah, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi atau probabilitasnya lebih besar dari 0,05 atau sebesar 0,1495. Hal ini berarti bahwa peningkatan PDRB tidak akan mempengaruhi belanja daerah di Provinsi Jambi.

Sedangkan Belanja daerah memiliki hubungan kausalitas dengan PDRB, hal ini dibuktikan dengan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $13,2763 > 4,737$ , kemudian nilai signifikansi atau probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 atau sebesar 0,0323. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi belanja daerah maka akan meningkatkan PDRB di Provinsi Jambi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belanja daerah dan PDRB tidak memiliki hubungan kausalitas dua arah. Belanja daerah memiliki hubungan dengan PDRB, tetapi sebaliknya PDRB tidak memiliki hubungan dengan belanja daerah.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka ada beberapa kesimpulan yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama adalah diterima, yaitu terdapat arah kausalitas (dua arah) antara penerimaan dan belanja daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $59,8573 > 4,737$ , kemudian nilai signifikansi atau probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 atau sebesar 0,0038. Artinya semakin tinggi belanja daerah maka dapat memicu peningkatan penerimaan daerah di Provinsi Jambi, sebaliknya semakin tinggi penerimaan daerah maka akan meningkatkan belanja daerah di Provinsi Jambi.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua tidak diterima, karena penerimaan daerah dan PDRB tidak memiliki hubungan kausalitas dua arah. hal ini dibuktikan dengan nilai  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau  $2,11203 < 4,737$ , kemudian nilai signifikansi atau probabilitasnya lebih besar dari 0,05 atau sebesar 0,2125. Artinya penerimaan

daerah memiliki hubungan dengan PDRB, tetapi sebaliknya PDRB tidak memiliki hubungan dengan penerimaan daerah.

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga tidak diterima, karena belanja daerah dan PDRB tidak memiliki hubungan kausalitas dua arah. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $13,2763 > 4,737$ , kemudian nilai signifikansi atau probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 atau sebesar 0,0323. Belanja daerah memiliki hubungan dengan PDRB, tetapi sebaliknya PDRB tidak memiliki hubungan dengan belanja daerah.

### **Saran**

Seperti yang telah dikemukakan pada kesimpulan diatas bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang tertarik dan berkecimpung dengan masalah anggaran yang dalam hal ini adalah APBD. Dari penelitian ini juga diharapkan agar otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga suatu daerah benar-benar dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Dengan penelitian di atas, dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi (dengan salah satu indikatornya PAD dan PDRB) dan besarnya Belanja daerah lebih banyak dipengaruhi oleh jumlah Dana Alokasi yang diterima dari pemerintah pusat, hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi. Jika hal ini masih terus berlanjut maka dikhawatirkan pelaksanaan otonomi daerah akan terhambat.

### **REFERENSI**

- Garner, 2005. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Ketiga. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Lincoln, 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Ketiga. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Simon Kuznets, 2003. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Todaro, Michael, P.2002. *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan Pendapatan*. LP3ES, Jakarta.